

Pemkot Bandung Gelar Silaturahmi Tokoh Agama Menyambut Tahun Baru Imlek 2577

Category: News

13 Februari 2026



Pemkot Bandung Gelar Silaturahmi Tokoh Agama Menyambut Tahun Baru Imlek 2577

Prolite – Suasana hangat penuh kebersamaan terasa di Pendopo Kota Bandung saat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar silaturahmi tokoh agama dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili tingkat Kota Bandung tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi simbol kuat harmoni antarumat beragama sekaligus perayaan keberagaman yang menjadi ciri khas Kota

Bandung.

Wakil Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia, Fam Kiun Fat dalam sambutannya mengajak hadirin memahami makna Imlek dari perspektif sejarah dan spiritual umat Konghucu.

Ia menjelaskan, penanggalan Kongzili berakar dari ajaran Nabi Kongzi yang lahir pada 551 sebelum Masehi, dengan sistem kalender yang mengikuti peredaran bulan dan musim.

Menurutnya, bagi umat Konghucu, Imlek bukan sekadar tradisi budaya, melainkan momentum keagamaan yang sarat nilai refleksi dan pembaruan diri.

Ia juga mengingatkan perjalanan panjang pengakuan hak-hak umat Konghucu di Indonesia yang kini semakin terbuka, serta mengapresiasi komitmen Kota Bandung dalam merawat toleransi.

“Keberagaman adalah kekuatan. Imlek mengajarkan kita untuk memulai tahun baru dengan semangat kebajikan dan persaudaraan,” ujarnya di Pendopo Kota Bandung, Selasa, (10/2/2026).

Fam Kiun Fat turut mengundang masyarakat untuk menikmati perayaan malam Imlek di kawasan Cibadak dan klenteng sebagai wisata religi dan budaya yang terbuka bagi semua kalangan.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai, silaturahmi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot menjadikan Bandung sebagai kota inklusif dan toleran.

Ia mengingatkan, sejak akhir 2024, Pendopo rutin menjadi ruang doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan.

“Kota Bandung adalah rumah bagi semua. Kerukunan bukan hanya slogan, tetapi fondasi kehidupan sosial kita,” kata Farhan.

Ia juga menyampaikan rencana dukungan operasional bagi rumah ibadah lintas agama sebagai bentuk penguatan kehidupan beragama yang setara dan harmonis.

Dalam sambutannya, Farhan mengaitkan pentingnya toleransi dengan kerja kolektif menyelesaikan persoalan kota, terutama pengelolaan sampah.

Menurutnya, masalah lingkungan hanya bisa diselesaikan melalui partisipasi seluruh warga tanpa memandang latar belakang.

“Sampah adalah masalah bersama. Penyelesaiannya pun harus bersama-sama. Toleransi bukan hanya soal keyakinan, tapi kerja nyata untuk masa depan kota,” ucapnya.

Pemkot Bandung saat ini menjalankan program pemilahan sampah berbasis wilayah hingga kawasan zero waste sebagai bagian dari transformasi lingkungan kota.

Perayaan Imlek tahun ini mengusung semangat nasional Harmoni Imlek Nusantara, yang mendorong ekspresi budaya dan kreativitas.

Bandung, sebagai kota kreatif, didorong untuk menjadikan momen Imlek sebagai ruang kolaborasi seni, busana, dan budaya.

Farhan menyebut perayaan Imlek sebagai momentum mempererat persaudaraan sekaligus merayakan identitas keberagaman Indonesia.

“Bandung tumbuh dari kebersamaan. Perbedaan justru memperkaya kita,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis dari perwakilan komunitas Konghucu kepada Pemkot Bandung dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dilanjutkan foto bersama sebagai simbol persatuan lintas iman.

DPRD Kota Bekasi Hadiri Konferensi Kerja I PGRI dengan Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030

Category: News

13 Februari 2026



DPRD Kota Bekasi Hadiri Konferensi Kerja I PGRI dengan Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030

BEKASI, Prolite – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bekasi menyelenggarakan Konferensi Kerja I PGRI Kota Bekasi Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030 sebagai forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan program kerja organisasi untuk periode lima tahun ke depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, ., M.M., Ketua PGRI Kota Bekasi, Sekretaris PGRI Provinsi Jawa Barat, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota

Bekasi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara organisasi profesi guru, legislatif, dan pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan di Kota Bekasi.

Konferensi Kerja I Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bekasi Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030 menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi program kerja organisasi sekaligus menyusun rencana dan strategi ke depan yang selaras dengan kebijakan pendidikan daerah dan nasional. Forum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi internal Persatuan Guru Republik Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut dibahas berbagai isu strategis terkait peningkatan profesionalisme guru, penguatan peran PGRI dalam mendukung mutu pendidikan, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Melalui pelaksanaan Konferensi Kerja I ini, Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bekasi diharapkan mampu menghasilkan program kerja yang terarah, terukur, dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dukungan dari DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat terus terjalin guna bersama-sama memajukan dunia pendidikan di Kota Bekasi.

Besok Pengurus Dekopin se-Indonesia Hadir di Acara

Rapimnas, Bahas Masa Depan Koperasi di Indonesia

Category: Daerah, Pemerintahan

13 Februari 2026



JAKARTA, Prolite – Seluruh pengurus Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) baik pusat dan wilayah akan berkumpul pada tanggal 26-27 Mei 2025 di Jakarta. Dekopin akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Ketua Umum Dekopin Bambang Hariyadi menyatakan bahwa Dekopin di bawah kepemimpinannya adalah Dewan Koperasi Indonesia Merah Putih karena pengurusnya terdiri dari seluruh golongan dan organisasi.

“Baik pengurus Dewan Koperasi Indonesia pusat maupun wilayah (Dekopinwil) berasal dari berbagai macam organisasi, golongan dan latar belakang. Kami tidak melihat mereka dari partai politik mana atau kelompok mana, kita semua bergabung di sini bersama-sama membangun koperasi di Indonesia,” kata Bambang

Hariyadi kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini menekankan kontribusi koperasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi pemerintahan Prabowo Subianto memiliki program Koperasi Desa Merah Putih.

“Pemerintah sangat mendukung perkembangan koperasi, jadi tidak ada alasan kita sebagai pelaku koperasi pesimis. Dewan Koperasi Indonesia sangat optimis koperasi di Indonesia akan maju karena kita bergerak bersama-sama pemerintah,” pungkasnya

Sementara itu Ketua Harian Dekopin Priskianto mengatakan jumlah koperasi di Indonesia mencapai ribuan, maka diperlukan kesamaan gerak agar dapat maju.

“Keberadaan koperasi di Indonesia menyentuh akar rumput, langsung menyentuh petani, nelayan, buruh dan rakyat kecil. Maka diperlu langkah-langkah yang terorganisir sehingga manfaatnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Dewan Koperasi Indonesia, kata Priskianto, telah memiliki program pembinaan koperasi di desa-desa sehingga dapat dikelola dengan baik dan profesional.

Dia berharap, pada rapimnas ini akan dapat menciptakan gerakan-gerakan yang masif bagi perkembangan dan kemajuan koperasi di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Dekopin Bidang Komunikasi Publik dan Sosialisasi Teguh Eko Prastyono menambahkan, rapimnas ini merupakan yang pertama di bawah kepemimpinan ketua umum Bambang Hariyadi.

“Kami seluruh pengurus pusat dan wilayah akan hadir di acara Rapimnas,” kata Eko.

Di rampinas nanti, lanjut Eko, pihaknya akan membahas program dan usulan dari para pengurus. “Dan akan kami sinergikan program pemerintah untuk memajukan pengkoperasian di

Indonesia,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Dewan Koperasi Indonesia di bawah kepemimpinan Bambang Hariyadi merupakan satu-satunya wadah gerakan koperasi yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Gus TEP, panggilan akrab pria ini melanjutkan, akan hadir di acara Rapimnas I Dekopin sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, juga pimpinan DPR dan MPR.

“Para menteri dan pimpinan DPR/MPR, juga lembaga-lembaga lainnya akan hadir di pembukaan Rapimnas Dekopin,” imbuhnya.

Eko menyatakan, saat ini beberapa pengurus Dekopinwil sudah tiba di Jakarta dan akan terus bertambah jumlahnya hingga jelang pelaksanaan Rapimnas.

“Mereka sudah tiba di Jakarta dan langsung konfirmasi ke panitia. Yang lainnya sedang dalam perjalanan dan tak lama lagi sampai,” ujar Eko.

PPDB 2024 Kurang Transparan , Anggota DPRD Kota Bekasi Jayadih Sesalkan Ini

Category: Pemerintahan
13 Februari 2026



PPDB 2024 Kurang Transparan, Anggota DPRD Kota Bekasi Jayadih Sesalkan Ini

Prolite – Setiap tahun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tak luput dari berbagai persoalan. Soal transparansi penerimaan siswa baru di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri itu juga turut disikapi Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Ahmad Jayadih.

Dia mendapati masih banyak siswa yang belum tertampung di sekolah negeri dengan sejumlah aturan. Pada PPDB kali ini, Jayadih juga menyoroti berkurangnya jumlah penerimaan siswa di setiap sekolah Negeri.

Permasalahan seperti ini selalu terulang dari tahun ketahunnya, tidak ada perubahan dalam PPDB

Bahkan tidak sedikit calon peserta didik baru tidak diterima di sekolah negeri yang masuk dlam jalur zonasi dari tepat tinggalnya.



Laporan yang ia terima sejatinya ketersediaan penerimaan siswa 9 hingga 11 kelas dipangkas menjadi 7 kelas pada tahun ini. Padahal, pembangunan sekolah baru terus ditambah.

“Saya harap Pemkot bisa kembali membuka kelas baru. Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah karena ingin masuk ke SMP Negeri,” tegasnya.

Dia menekankan, pemerintah dalam hal ini harus hadir dan memberikan solusi. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak siswa yang ingin masuk di sekolah negeri dengan alasan keterbatasan biaya.

“Ya pemerintah harus hadir. Bagaimana caranya agar anak-anak yang belum sekolah khususnya jenjang SMP bisa bersekolah di tempat yang ditujunya,” kata Bang Kojay sapaan akrabnya.

Lanjut dia, meskipun SMP Negeri di Kota Bekasi mencapai 62 sekolah, akan tetapi jumlah tersebut tidak bisa menampung seluruhnya anak-anak lulusan SD ke SMP Negeri. Melihat hal itu seharusnya tidak terjadi pengurangan kelas dan sejatinya ada penambahan.

“Dengan adanya penambahan kelas saya yakin anak-anak yang belum masuk ke sekolah ke jenjang SMP bisa tertampung di SMP Negeri,” ujarnya.